

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

Tubagus Senopati Manggala Raja

tubagussenopati4@gmail.com

Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to test and to analyze the impact of the accountability, the transparency, and the report system toward the government performance which the performance is a representation of the accountability for the activities that have been done. The type of this study is a quantitative. For collecting the data, this study distributes questionnaires directly to the respondents. The samples of this study applies the purposive sampling based on the criteria. There are 78 respondents for this study. The study applies the multiple linear regression method with SPSS version 25. The result of this study shows that the accountability gives positive impact to the government performance, since the better accountability they have, the higher level of the government performance they have, On the other hand, the transparency gives positive impact to the government performance, since the better accountability they have, the higher level of the government performance they have. For the report system, since the better accountability they have, the higher level of the government performance they have. This result is compatible with the formulated hypothesis in this study.

Keywords: accountability, transparency, report system, government performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah dimana kinerja pemerintah merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kegiatan ataupun aktivitas yang telah dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan secara langsung ke responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan pada kriteria. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik akuntabilitas maka semakin tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik transparansi maka semakin tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Untuk sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik sistem pelaporan maka semakin tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, sistem pelaporan, kinerja pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga atau organisasi sektor publik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Dalam pengelolaan organisasi publik bersumber pada tata kelola yang baik, dengan adanya pedoman yang jelas maka diharapkan mampu membawa dampak yang baik bagi kemajuan organisasi. Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki sumber daya manusia yang digunakan untuk menjalankan tugas dari sebuah organisasi tersebut. Namun sumber daya manusia juga dapat menimbulkan permasalahan karena tidak semua sumber daya

manusia memiliki kemampuan yang sama dalam penyelesaian tugasnya. Apabila sumber daya manusia tidak bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya juga berdampak pada pencairan dana, semakin lama dana cair semakin lama juga kebutuhan publik untuk terpenuhi. Masyarakat menuntut organisasi sektor publik agar dalam pelaksanaannya dilakukan secara akuntabel, transparansi dan penuh tanggung jawab. Dalam pengelolaan anggaran pada kinerja keuangan publik sangat penting adanya akuntabilitas dan transparansi karena dalam memberikan hasil akhir diperlukan adanya keterbukaan terhadap publik serta pertanggungjawaban.

Kinerja organisasi publik di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik sekarang ini dirasakan masih kurang hampir setiap saat beberapa media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Ketidakpuasan tersebut terlihat dalam beberapa unjuk rasa. Tuntutan tata kelola yang baik juga berlaku bagi organisasi desa. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Pemerintah desa akan bekerja untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam usaha mengatur dan mengurus keperluan masyarakat setempat berdasarkan pada sejarah dan adat istiadat. Dalam lingkup pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksana tugas di desa diharapkan mampu melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik agar tercipta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga di Surabaya. Kinerja pemerintah perlu adanya pengukuran kinerja agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan yang paling utama adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan atau ditetapkan pada saat perencanaan. Salah satu lingkungan yang mempengaruhi sektor publik adalah faktor ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, struktur produksi, tingkat inflasi, arus modal, tenaga kerja, kemiskinan, infrastruktur, sektor informasi, dan kesenjangan ekonomi (Mardiasmo, 2009). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pelayanan publik berkualitas merupakan suatu bentuk perubahan penyelenggaraan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Dikarenakan publik menaruh harapan yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program maupun aktivitas rutin yang dikerjakan organisasi sektor publik. Akuntabilitas juga merupakan konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang membutuhkan segala informasi mengenai organisasi tersebut. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas beserta kinerja dari organisasi agar dapat berorientasi terhadap kepentingan publik. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan informasi baik informasi keuangan maupun informasi yang lainnya yang akan

digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2009) agar laporan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel maka sebaiknya diperlukan keterlibatan antara pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan tersebut. Pemerintah selaku dana publik harus bisa menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya.

Sistem pelaporan dibutuhkan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban dalam laporan yang harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawabannya beserta anggaran, sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan terhadap anggaran (Arifin, 2012). Suhaesti (2016) menyatakan bahwa adanya sistem pelaporan yang baik mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimbangan, sehingga sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2019) yang menyatakan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, tentunya pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas serta sistem pelaporan yang baik. Menurut Asrini (2015) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Maka akuntabilitas sangat penting dalam organisasi, karena suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?, (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?, (3) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Stewardship Theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *Stewardship Theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri, 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. *Stewardship Theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari suatu sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara lain informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai (Krina, 2013). Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika, yaitu sebuah objek transparan atau objek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi didalam jabatan yang di embannya.

Sistem Pelaporan

Menurut Anthony dan Vijay (2000), Sistem pelaporan merupakan laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran bersumber pada aspek yang jadi pemicu anggaran itu sendiri serta unit organisasi yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan dalam memantau serta mengatur kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang sudah diresmikan. Pemerintah berkewajiban untuk membagikan data keuangan serta data yang lain yang hendak digunakan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010), kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Auditya *et al.*, (2013), dalam penelitian tersebut dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat struktural yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, pengambilan sampel menggunakan metode survei dengan jumlah sampel penelitian sebesar 82 pegawai. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Anjarwati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitiannya menyatakan bahwa kejelasan sasaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap anggaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sedangkan variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

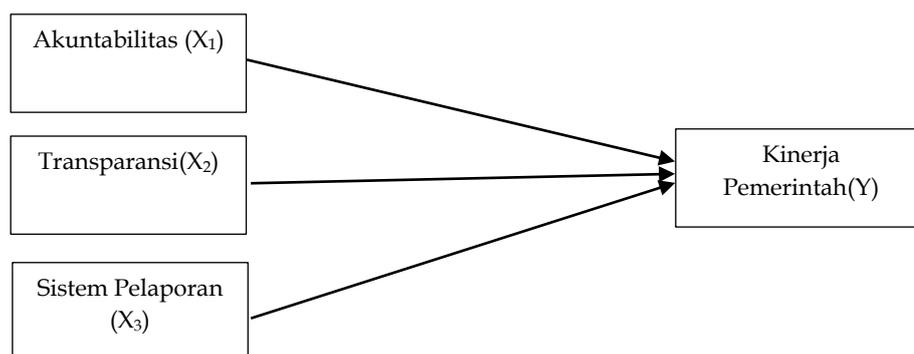
Wiguna dan Budi (2015), dengan judul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai Inspektorat Kabupaten Buleleng di bidang pengawasan dan bidang auditor, pengambilan sampel menggunakan metode survei dengan jumlah sampel penelitian sebesar 34 pegawai. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis linier regresi berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji F dan Uji t menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah.

Martha (2014), dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung). Populasi dalam penelitian ini adalah 17 dinas yang ada di Pemerintahan Kota Bandung, pengambilan sampel menggunakan metode survei dengan jumlah sampel penelitian sebesar 61 responden. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji F dan Uji t menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Setiawan dan Safri (2016), dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bongo. Populasi dalam penelitian ini adalah lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Bongo, pengambilan sampel menggunakan metode survei dengan jumlah sampel penelitian sebesar 42 pegawai. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji F dan Uji t menunjukkan bahwa secara bersamaan akuntabilitas publik, transparansi publik, kontrol, dan manajemen keuangan daerah, mempengaruhi kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Bongo. Secara parsial, akuntabilitas publik, transparansi publik, kontrol, dan manajemen keuangan daerah mempengaruhi kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Bongo.

Rerangka Konseptual

Berikut ini model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang telah dikembangkan dapat disederhanakan dalam bentuk rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual
Sumber: Data primer diolah, 2020

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan terhadap masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan untuk mereka menilai pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang telah dikerjakan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua

kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah dapat dinilai pihak internal maupun eksternal (Wiguna dan Budi, 2015). Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan, antara lain oleh Wiguna dan Budi (2015) yang melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah telah memberikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah

Transparansi menunjukkan bahwa pelayanan publik atau suatu organisasi pemerintah melakukan keterbukaan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, informasi mengenai kebijakan dan proses pembuatan serta pelaksanaannya. Transparansi merupakan keterbukaan secara nyata, menyeluruh dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola sumber daya publik. Penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan, antara lain dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2013), Martha (2014), Setiawan dan Safri (2016) telah memberikan bukti bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja untuk menerapkan anggaran yang sudah ada Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Penjelasan diatas sejalan dengan penelitian menurut Anjarwati (2012) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), untuk melaporkan data yang menggunakan pendekatan kuantitatif ialah dengan menggunakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk mempelajari suatu populasi ataupun sampel tertentu yang akan digunakan dalam penelitian dengan melakukan pengumpulan informasi yang digunakan yang dinamakan instrumen penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan ciri permasalahan yang bisa dilakukan dengan memakai metode kausal komparatif (*causal-comparative research*). Menurut Sugiyono (2016) *causal-comparative research* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas serta pengaruh antara 2 variabel ataupun lebih. Penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian *ex post facto* yakni jenis penelitian terhadap data- data yang dikumpulkan setelah terdapatnya peristiwa fakta ataupun kejadian. Penelitian ini memakai metode survey, dimana penelitian menggunakan populasi besar ataupun kecil namun data yang dipelajari merupakan data sampel yang diambil dari populasi yang telah dipilih dengan menyebarkan kuesioner hasil responden yang mengisi kuesioner secara langsung yang berbentuk statment tertulis.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel dapat diartikan sebagai beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada oleh suatu populasi. Untuk memperoleh sampel yang representatif dari suatu populasi maka diperlukan metode yang baik dan benar dalam menentukan pemilihan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena sumber data yang dipilih dengan menggunakan pertimbangan, berasal dari sumber yang sengaja dipilih untuk memudahkan peneliti memahami objek yang sedang diteliti dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. (1) Memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala bagian, kepala sub bagian, staff bagian keuangan dan staff yang berada dalam lingkungan SKPD Kota Surabaya, (2) Dinas, badan yang terdaftar dalam www.surabaya.go.id, (3) Memiliki masa kerja minimal 5 tahun di masing-masing pemerintahan SKPD Kota Surabaya yang dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang merupakan data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara yang menjadi sasaran penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan terstruktur yang terdapat dalam kuesioner yang diajukan. Kuesioner yang dibagikan akan diisi langsung oleh kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan staf bagian keuangan yang didapat dari objek yang diteliti pada SKPD Kota Surabaya selanjutnya hasil kuesioner berupa jawaban dari responden diukur menggunakan skala likert. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari responden dapat diberi skor, sebagai berikut: 5=Sangat setuju/selalu/sangat positif, 4= Setuju/sering/positif, 3= Ragu-ragu/kadang-kadang/netral, 2= Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif, 1= Sangat tidak setuju/tidak pernah

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variabel adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah. Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala *Likert*.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban antara agent yang sebagai penerima amanah dalam menyajikan, mempertanggungjawabkan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang dilakukan yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada principal sebagai pemberi amanah.

Transparansi

Transparansi merupakan pelayanan publik atau suatu organisasi pemerintah melakukan keterbukaan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan sebuah rangkaian atau mekanisme yang sangat dibutuhkan untuk menyajikan laporan keuangan maupun laporan kinerja.

Kinerja Pemerintah

Harapan masyarakat sangat besar terhadap kinerja pemerintah agar kinerja pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka diperlukan adanya akuntabilitas, transparansi kedua variabel tersebut sangat dapat membantu kinerja pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah adalah kemampuan pegawai yang terlibat dalam pencapaian pelaksanaan atas suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan serta hal pengelolaan keuangan disetiap SKPD dalam membuat atau menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan daerah yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk memecahkan suatu masalah maupun pengujian hipotesis. Penelitian ini dalam teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis menggunakan perhitungan SPSS yang bertujuan untuk menentukan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintahan diperlukannya untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing variabel. Apakah akuntabilitas, transparansi dan sistem pelaporan telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan benar-benar dirasakan dampaknya bagi pegawai dan masyarakat (Untuk mengetahui kinerja sudah baik atau tidak). Menurut Ghozali (2018), Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang menunjukkan hasil yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness dari masing-masing variabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghozali (2018), yang menjadi dasar analisis terhadap pengujian validitas apakah item valid atau tidak dapat dilakukan perbandingan yaitu apabila: 1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat dikatakan pertanyaan atau indikator yang digunakan valid, 2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dapat dikatakan pertanyaan atau indikator yang digunakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur indikator dari variabel atau konstruk yang ada pada kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2018:45), Suatu konstruk atau variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronchbach $> 0,70$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel-variabel dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal, atau mendekati normal. Pada

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi dapat dikatakan baik apabila antar variabel independen tidak terjadi adanya korelasi. Pengukuran multikolinieritas dapat diukur dengan menggunakan tolerance value dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabilitas independen yang terpilih tetapi tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya dapat diukur oleh nilai *tolerance*. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan *Value Inflation Factor* (VIF) tinggi. Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau *Value Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, (2) Apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau *Value Inflation Factor* (VIF) > 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdapat dua atau lebih variabel. Analisis regresi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih tetapi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018:95). Bentuk umum persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 Ak + \beta_2 Tr + \beta_3 SP + e$$

Dimana:

KP : Kinerja Pemerintah
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 Ak : Akuntabilitas
 Tr : Transparansi
 SP : Sistem Pelaporan
 e : *error*

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat sehingga model dapat dikatakan layak. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel

independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah sehingga dapat dikatakan kurang layak.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau secara simultan sama dengan nol. Kriteria pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 yaitu jika nilai $F > 0,05$, maka hipotesis diterima, artinya semua variabel independen secara layak berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan jika $F < 0,05$, maka hipotesis ditolak artinya semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Statistik t

Ghozali (2018:98) menyatakan bahwa Uji statistik t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 yaitu jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AK	78	31	44	37,96	2,903
TR	78	23	40	34,49	4,025
SP	78	21	30	25,72	2,119
KP	78	26	41	33,50	3,879
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa sikap akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 31 dan nilai maximum sebesar 44 dengan *mean* sebesar 37,96 dan standar deviasi sebesar 2903, sedangkan transparansi perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum 44 dengan *mean* sebesar 34,49 dan nilai standar deviasi 4,025, sistem pelaporan memiliki minimum 21 maksimum 30 sedangkan *mean* dalam sistem pelaporan sebesar 25,72 dan standar deviasi sebesar 2,119. Untuk Kinerja Pemerintah memiliki nilai minimum 26, nilai maximum 41, *mean* sebesar 33,50 dan nilai standar deviasi 3,879.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
Akuntabilitas	AK 1	0,381	0,2227	Valid
	AK 2	0,654	0,2227	Valid
	AK 3	0,391	0,2227	Valid
	AK 4	0,663	0,2227	Valid
	AK 5	0,652	0,2227	Valid
	AK 6	0,665	0,2227	Valid
	AK 7	0,483	0,2227	Valid

	AK 8	0,543	0,2227	Valid
	AK 9	0,423	0,2227	Valid
Transparansi	TP 1	0,508	0,2227	Valid
	TP 2	0,555	0,2227	Valid
	TP 3	0,592	0,2227	Valid
	TP 4	0,639	0,2227	Valid
	TP 5	0,526	0,2227	Valid
	TP 6	0,804	0,2227	Valid
	TP 7	0,640	0,2227	Valid
	TP 8	0,577	0,2227	Valid
Sistem Pelaporan	SP 1	0,511	0,2227	Valid
	SP 2	0,689	0,2227	Valid
	SP 3	0,602	0,2227	Valid
	SP 4	0,722	0,2227	Valid
	SP 5	0,585	0,2227	Valid
	SP 6	0,719	0,2227	Valid
Kinerja Pemerintah	KP 1	0,527	0,2227	Valid
	KP 2	0,603	0,2227	Valid
	KP 3	0,591	0,2227	Valid
	KP 4	0,655	0,2227	Valid
	KP 5	0,484	0,2227	Valid
	KP 6	0,649	0,2227	Valid
	KP 7	0,711	0,2227	Valid
	KP 8	0,588	0,2227	Valid
	KP 9	0,618	0,2227	Valid

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai r tabel lebih dari r hitung. Dimana r hitung dari responden 78 adalah 0,2227 dan dibulatkan menjadi 0.223 agar mudah diklafikasi bahwa r hitung valid atau tidak.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Akuntabilitas	0,703	9	Reliabel
Transparansi	0,748	8	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,713	6	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,776	9	Reliabel

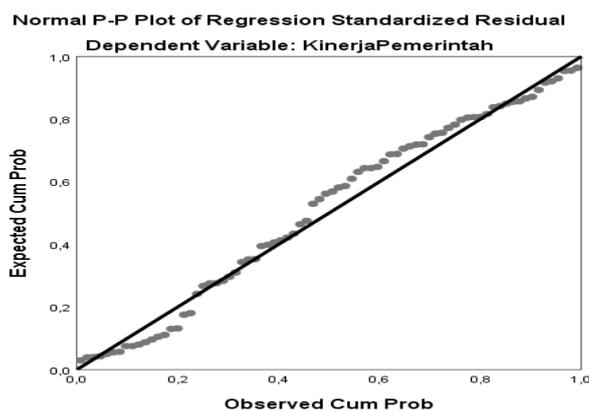
Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa setiap variabel bisa dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar 0,7. Setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* masing-masing sebesar Akuntabilitas (0,703), Transparansi (0,748), Sistem Pelaporan (0,713), Kinerja Pemerintah (0,776). Jadi setiap variabel dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* > 0,7.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data digunakan untuk menguji model regresi antara variabel dependen dan variabel independen apakah keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak. Jika distribusi data tersebut normal, maka menggambarkan garis yang mengikuti garis diagonalnya. Untuk mendeteksi normalitas data yaitu dengan melihat *Probability plot*. Uji normalitas data dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut.



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji *Kolmogorov Smirnov* nilai signifikansi menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, dan angka tersebut menunjukkan lebih dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandarized Residual 75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,34589543
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,079
	Negative	-,083
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya suatu korelasi yang signifikan antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak adanya korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan cara melihat *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai *Tolerance Value* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficient^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,402	2,486
Transparansi	0,733	1,364
Sistem Pelaporan	0,440	2,274

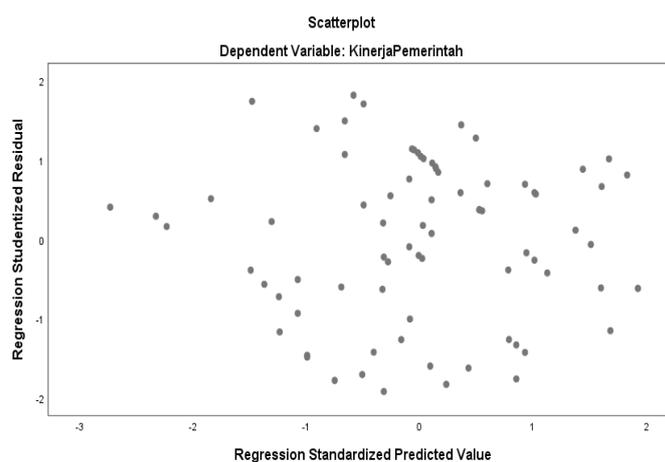
Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel tidak terjadi multikolinieritas karena variabel Akuntabilitas memiliki nilai VIF sebesar 2,486 dan nilai

Tolerance 0,402, untuk variabel Transparansi memiliki nilai VIF sebesar 1,364 dan nilai *Tolerance* 0,733, dan variabel Sistem Pelaporan memiliki nilai VIF sebesar 2,274 dan *Tolerance* 0,440. Dari penelitian ini bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas karena setiap variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, dan nilai *Tolerance* > 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas akan disajikan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar diatas bisa dilihat tidak ada titik-titik yang mengumpul membentuk pola tertentu atau tidak ada pola membentuk corong. Titik-titik diatas menyebar diatas nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Pemerintah. Dari hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficient			
	B	Std. Error	T	sig.
(Constant)	-8,123	3,742	-2,171	,033
Akuntabilitas	,492	,148	3,323	,001
Transparansi	,256	,079	3,231	,002
Sistem Pelaporan	,549	,194	2,830	,006

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KP = -8,123 + 0,492AK + 0,256TR + 0,549SP + e$$

Persamaan regresi dapat menunjukkan variabel akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan yang memiliki koefisien pertanda positif. Dari persamaan yang ada diatas dapat disimpulkan, bahwa menunjukan masing-masing variabel independen yang memiliki nilai koefisien regresi, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukan angka positif sebesar 0,492. Maka dapat diartikan Akuntabilitas memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah, (2) Koefisien Transparansi dalam persamaan linier berganda pada penelitian ini menunjukan angka positif sebesar 0,256. Maka dapat diartikan bahwa Transparansi memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah, (3) Koefisien Sistem Pelaporan dalam persamaan linier berganda pada penelitian ini menunjukan angka positif sebesar 0,549. Ini dapat diartikan bahwa Sistem Pelaporan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Semakin kuat pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan sitem pelaporan maka akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) ini menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen, sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam hal menjelaskan variabel sangat terbatas. Hasil uji koefisien determinasi akan disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,795 ^a	0,633	0,618	2,393

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,633 atau 63,3% yang mempunyai arti bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini antara lain akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan, sedangkan sisanya 36,7% kinerja pemerintah Kota Surabaya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model penelitian ini

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji apakah model yang dibuat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan dalam penelitian. Uji ini mempunyai kriteria pengujian yaitu antara lain: (1) Jika nilai signifikan > 0,05, maka model yang menunjukkan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis berikutnya. (2) Jika nilai signifikan < 0,05, maka model yang menunjukkan dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Hasil uji f dalam penelitian ini akan disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	729,752	3	243,252	42,479	,000 ^b
	Residual	423,748	74	5,725		
	Total	1153,500	77			

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 42,479 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari $< 0,05$, maka menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model yang menunjukkan dalam penelitian layak dan dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis Uji t digunakan dengan tujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan secara individual terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah. Adapun prosedur pengujian yang digunakan antara lain apabila nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficient^a

	<i>Unstandardized Coefficient</i>		<i>Standar Coefficient</i>		
Model	B	Std. Error	Beta	T	sig.
(Constant)	-8,123	3,742		-2,171	,033
Akuntabilitas	,492	,148	,369	3,323	,001
Transparansi	,256	,079	,266	3,231	,002
Sistem Pelaporan	,549	,194	,301	2,830	,006

Sumber: Data kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 diatas hasil uji t menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen Akuntabilitas, Sistem Pelaporan dan Kinerja Pemerintah dan variabel dependen Kinerja Pemerintah sebagai berikut: (a) Hipotesis 1 yaitu Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dan nilai 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, (b) Hipotesis 2 yaitu Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002. Dan nilai 0,002 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima, (c) Hipotesis 3 yaitu Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Pemerintah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006. Dan nilai 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa apabila akuntabilitas semakin baik maka kinerja pemerintah juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya apabila akuntabilitas rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Didalam pemerintahan akuntabilitas publik diterapkan dengan baik agar terwujudnya pemerintah yang bertanggungjawab dan transparan. Jadi dengan adanya akuntabilitas terhadap kepada

masyarakat tidaklah untuk mengetahui anggaran tersebut melainkan mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. Hal ini pemerintah melaksanakan dengan baik seluruh perencanaan yang ada karena dinilai serta diawasi oleh masyarakat.

Dengan demikian juga, akuntabilitas menerapkan kinerja pemerintah yang bersifat transparan dan terukur agar mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan juga semua tingkatan pada SKPD akan meningkatkan kinerja manajerial. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan dengan adanya akuntabilitas pemerintah akan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan atau diterapkan sehingga kinerja aparat pemerintah dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa apabila transparansi semakin baik maka kinerja pemerintah juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya apabila transparansi rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Krina (2013) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara lain informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam insitusi atau setiap lembaga publik yang mempunyai kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan dalam upaya sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah/akan diambil atau disepakati didalam institusi tersebut. Pemberian informasi kepada publik yang menjadikan kinerja pemerintah atau kegiatan dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui dan dikontrol oleh publik karena mudah dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dengan adanya transparansi yang baik maka tingkat kinerja pemerintah juga semakin meningkat dalam menjalankan tugasnya, serta dengan adanya prinsip transparansi akan memberikan dampak terhadap kinerja SKPD di masa yang akan datang.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa apabila sistem pelaporan semakin baik maka kinerja pemerintah juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya apabila sistem pelaporan rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Anthony dan Vijay (2000) menyatakan bahwa sistem pelaporan merupakan laporan anggaran yang merinci macam- macam prestasi dari anggaran bersumber pada aspek yang jadi pemicu anggaran itu sendiri serta unit organisasi yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Tujuan dari sistem pelaporan adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi dan yang mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif dalam menghadapi sebuah permasalahan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah maka diperlukan dilakukan adanya pelaporan yang sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka akan menciptakan kinerja pemerintah yang bersifat akuntabel dan transparan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah di SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan seperti berikut: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka kinerja pemerintah juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya jika akuntabilitas rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun. (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka kinerja pemerintah juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya jika transparansi rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun. (3) Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan maka kinerja pemerintah juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya jika sistem pelaporan rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari kesimpulan yang telah diperoleh, dapat dikembangkan dengan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Saran merupakan suatu masukan agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Berikut adalah saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya. Karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kinerja keuangan, (2) Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel, yakni dengan menggunakan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang dapat dijadikan objek penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh, (3) Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan indikator lain sesuai dengan yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuesioner yang sesuai dengan kondisi penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. dan Hatta, E. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 7 (2):24-35.
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting AnalysisJourn*, 1(2).
- Anthony, N. R. dan Vijay, G. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Arifin, Z. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Asrini, A.P. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1* 3(1).
- Auditya, L, Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JurnalFairness* 3(1): 21-42, ISSN 2303-0348).
- Daniri, M.A . 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.
- Donaldson,L.,dan Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Krina, L. 2013. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1).
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martha, W. 2014. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Nordiawan, D. dan Ayuningtyas, H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Pratama, R, Henri, A, Salma T. 2019. Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi: ISSN 2656-3649*
- Setiawan, H.E. and Safri, M. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 4(1): 51-72.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhaesti, S. R. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). 3(1).
- Wiguna, M, dan Budi S. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1).